

**DAMPAK KEKERASAN PEMILU TERHADAP PARTISIPASI
POLITIK DI PIDIE**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

ZULFAHMI AL FAROZI

NIM. 150802094

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020**

**DAMPAK KEKERASAN PEMILU TERHADAP
PARTISIPASI POLITIK DI PIDIE**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Serjana (S.1) Pada Prodi Ilmu politik

Oleh:

ZULFAHMI AL FAROZI

NIM.150801094

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Prodi Ilmu Politik

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Dr. Muhammad, M. Ed
NIP.1960072211997031991

Pembimbing II



Rizkika Lhena Darwin, S.IP. MA
NIP.196107061991011000

**DAMPAK KEKERASAN PEMILU TERHADAP
PARTISIPASI POLITIK DI PIDIE**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana(S-1) Ilmu Politik

Diajukan oleh :
ZULFAHMIAL FAROZI
NIM. 150801094

Pada hari/ Tanggal

Kamis : 16 Januari 2020
21 Jumadil Awal 1441 H

Di
Darusalam- Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua



Dr. Muhammad, M. Ed
NIP. 1960072211997031991

Sekretaris



Rizkika Lhena Darwin, S.IP,MA
NIP.198812072072018032001

Penguji I



Dr. Ernita Dewi, S.Ag.,M,hum
NIP. 197307232000032002

Penguji II



Daniil Akbar Taqwadin, B.IAM,M.sc
NIDN.2008048903

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197307232000032002

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :Zulfahmi Alfarozi

NIM :150801094

Jurusan :Ilmu Politik

Fakultas :Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan memepertanggung jawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah oranglain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya in*

Bila dikemudian hari ada tuntutan pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat di pertanggung jawabkan dan ternyata memnag ditemukan bukti bahwa saya telah melannggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Uin Ar-raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 7 Januari 2019



Yang Menyatakan,

Zulfahmi Al Farozi

ABSTRAK

Angka partisipasi pemilukada pada tahun 2012 di Pidie tinggi begitu juga dengan angka kekerasan Dan pada tahun 2017 partisipasi di Pidie menurun begitu juga dengan angka kekerasan pada pemilihan bupati dan wakil bupati Pidie Argumetasi dalam penelitian ini menjelaskan beberapa hal yang menyebabkan menurunnya partisipasi maupun kekerasan pada pelaksanaan pemilukada pada tahun 2017 yaitu: 1) Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara 2) Mulai adanya kedewasaan politik dari pengusung partai mengenai dampaknya kekerasan. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui beberapa hal. Pertama, apakah terjadinya penurunan Partisipasi yang terjadi di Pidie diakibatkan oleh kekerasan. Kedua, apakah yang mengakibatkan sehingga terjadinya penurunan kekerasan. Penelitian ini dilakukan di kabupaten Pidie, dan menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Objek dalam penelitian ini adalah PA, PNA, KIP, Bawaslu dan Masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya penurunan partisipasi kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait. Dan terjadinya penurunan kekerasan disebabkan oleh mulai adanya kedewasaan dan dari pihak pengusung partai dalam berpolitik.

Kata Kunci : Kekerasan Pemilu dan Partisipasi Politik

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji serta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah *Subhanahuwata'ala* atas segala rahmat dan hidayah-Nya, yang telah memberikan kesehatan, umur panjang serta kemudahan sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad Rasulullah *Sallallahu 'alaihiwasalam* yang telah bersusah payah mengembangkan agama Islam dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan. Dalam rangka menyelesaikan studi pada Jurusan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, sebagai mahasiswa berkewajiban untuk menyelesaikan skripsi dalam memenuhi beban studi di Fakultas Ilmu sosial dan ilmu pemerintahan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam bidang Ilmu politik. Adapun pedoman penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Ilmu sosial dan ilmu pemerintahan.

Alhamdulillah berkat Allah *Subhanahuwata'ala*, proses penulisan skripsi ini yang berjudul “Dampak Kekerasan Pemilu Terhadap Partisipasi Politik di Pidie” dapat berjalan dengan lancar dan baik. Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, serta motivasi dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan ribuan terimakasih serta penghargaan yang tak terhingga nilainya kepada kedua orang tua ayahanda tercinta Sahyan Maha dan Ibunda Nuraida Brutu dimana beliau telah melahirkan, membesarkan

serta mendidik, penulis tidak bisa membalas apa yang telah diberikan, hanya Allah lah yang membalas segala kebajikannya. Kepada saudara-saudara, adik-adik yang telah memberikan semangat dan motivasi yang sangat besar bagi penulis, serta seluruh keluarga besar tercinta yang senantiasa memberikan dorongan yang tak ternilai bagi penulis.

Dalam melaksanakan penulisan tugas akhir dan penelitian ini, penulis telah banyak memperoleh bimbingan dan arahan yang sangat bermanfaat dari berbagai pihak, terutama dari para pembimbing. Untuk itu, penulis menyampaikan ribuan rasa terima kasih yang tulus kepada bapak Dr. Muhammad, M.Ed. sebagai pembimbing utama Ibu Rizkika Lhena Dharwin, M.A sebagai pembimbing kedua, yang di sela kesibukan mereka masih menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan, pengarahan serta motivasi yang sangat berharga dari awal hingga akhir proses penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada pihak pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan ibu Dr. Ernita Dewi, M. Hum, beserta stafnya, ketua jurusan Dr.Abdul Sani. Lc.M.A dan para stafnya, dan Penasehat akademik Dr. Muhammad, M.Ed yang telah memberikan nasehat dan bantuan dalam pengurusan dokumen pelengkap yang berhubungan dengan skripsi ini. Juga terimakasih banyak penulis ucapkan kepada seluruh dosen dan karyawan yang ada di Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu pemerintahan UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan bantuan ilmu pengetahuan yang baik untuk bekal masa depan yang akan datang.

Ucapan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat wak genk, Kongkow yang telah membantu penulisan skripsi ini. Dan mahasiswa Ilmu politik leting 2015 dan teman-teman seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Serta kepada semua mahasiswa Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Pemerintahan leting 2015.

Meskipun begitu banyak yang membantu dalam penyelesaian skripsi, namun penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan ilmu yang penulis miliki, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik itu dari segi isi maupun penulisan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Banda Aceh, 7 Januari 2020
Penulis,

Zulfahmi Al Farozi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SIDANG	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Masalah	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Penelitian Terdahulu.....	4
BAB II KERANGKA TEORITIS	7
2.1 Teori Partisipasi Politik	7
2.2 Tipologi Partai Politik	12
2.3 Teori Dalam Kekerasan Pemilu.....	14
BAB III METODE PENELITIAN	19
3.1 Dasar Penelitian.....	19
3.2 Lokasi Penelitian	19
3.3 Fokus Penelitian	20
3.4 Sumber Data Penelitian	20
3.5 Metode Pengumpulan Data	21
3.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	22
3.7 Metode Analisis Data	23
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	25
4.1 Konstelasi Politik PILKADA Pidie 2017.....	25
4.2 Kekerasan Dan Partisipasi Politik Pada PILKADA 2017	30
4.3 Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Menurunnya Kekerasan.....	47
BAB V PENUTUP	52
5.1 Kesimpulan.....	52
5.2 Saran	53
DAFTAR KEPUSTAKAAN	54
LAMPIRAN	55

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 4.1 Konstilasi Politik dan Pilkada Pidie	27
Tabel 4.2 Kekerasan dan Partrispasi politik pada pilkada Pidie 2017.....	37



DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Surat Keputusan Pembimbing
3. Foto Penelitian
4. Daftar Riwayat Hidup penulis



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara ideal, tujuan penyelenggaraan Pemilu ialah untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat juga melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip hak-hak asasi warga negara. Adanya kata-kata tertib dan damai adalah karena dua hal itulah yang menjadi dambaan serta esensi dalam pergantian kepemimpinan yang dikemas dengan penyelenggaraan Pemilu. pergantian kepemimpinan yang tidak tertib dan damai seperti maraknya praktik pelanggaran pemilu misalnya kekerasan, maka dapat memicu kekacauan sosial dan kesenjangan di tengah-tengah masyarakat. Kekerasan merupakan tindakan pelanggaran yang dapat menyebabkan kekacauan di kalangan masyarakat banyak.

Penyelenggaraan pemilu seharusnya berjalan dengan jujur dan adil yang dimana masyarakat menginginkan hak berdemokrasi berjalan aman dan baik. Negara juga harus menjamin bahwa pemilu adalah merupakan cara yang demokratis untuk memilih wakil-wakil rakyat. Dapat dikatakan pula bahwa pemilu merupakan cara yang demokratis untuk memilih wakil rakyat menggunakan sistem demokrasi. Dalam pengertian yang umum, Pemilu merupakan wujud dari demokrasi. Konsekuensinya, hakikat demokrasi harus menjadi acuan dasar dalam penyelenggaraan pemilu.

Dampak dari kekerasan adalah dapat memicu konflik yang berkepanjangan sehingga mengakibatkan kerugian bagi individu maupun kelompok. Kondisi ini tentu saja menimbulkan trauma bagi sebagian masyarakat Aceh khususnya di daerah-daerah yang rawan konflik. Masyarakat Aceh masih trauma dengan konflik antara GAM dan RI mengingat proses rekonsiliasi belum terealisasi dengan baik.. Fungsi dan tugas pengawas serta penyelenggara pemilu pada akhirnya kembali dipertanyakan mengingat kekerasan pemilu di Aceh selalu terjadi.

Preferensi masyarakat dalam memilih masih diragukan, karna menimbulkan ketakutan dengan adanya ancaman dari pihak elit sehingga menyebabkan dalam memilih dikalangan masyarakat. Ini menunjukkan kedewasaan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Apalagi semua orang mengharapkan PILKADA ini lebih baik, demokratis, dan aman. Kalaupun ada intimidasi bisa dicegah oleh badan pengawas pemilu. Ini sangat luar biasa bahwa masyarakat berani menyuarkan hak pilih dengan benar. Siapa pun yang terpilih ini pilihan rakyat

Partisipasi pemilih pada PILKADA 2012 yang ada di Aceh sebesar 75 % partisipasi itu menurun pada PILKADA 2017 yaitu sebesar 72,3 % dengan menurunnya partisipasi juga diikuti dengan menurunnya angka kekerasan pada pilkada 2012 yaitu sebesar 40 kasus sedangkan kekerasan pilkada pada 2017 menurun yaitu sebesar 19 kasus yang terjadi di Aceh

Dibandingkan dengan jumlah presentase partisipasi pemilih PILKADA 2012 jumlahnya memang lebih besar dari PILKADA 2017 yaitu sebesar 75%

tetapi hasil itu diwarnai dengan banyaknya aksi kekerasan, penindasan, ancaman dan hal lainnya yang membuat masyarakat resah, jauh berbeda dengan pilkada tahun 2017 terlihat baik, aman dan demokratis.¹

Pelaksanaan PILKADA di Pidie tidak jauh berbeda dengan angka kekerasan dan angka partisipasinya yang ada diseluruh Aceh, samahalnya Pidie yang menurunnya angka partisipasinya dan di ikuti pula menurunnya angka kekerasan. pada pilkada tahun 2012 terdapat angka partisipasi yaitu 77,69 % dan pada PILKADA 2017 partisipasinya 70,4%. Dan Sumber Aceh institut angka kekerasan PILKADA di pidie pada tahun 2012 yaitu 7 kasus sedangkan pada tahun 2017 6 kasus²

Menurut saya bahwa tingkat kekerasan mempengaruhi angka partisipasi, maka dari itu menarik bagi saya untuk meneliti tentang dampak kekerasan pilkada terhadap partisipasi masyarakat dalam politik dan di sini saya mengambil wilayah Pidie karena merupakan salah satu wilayah yang ada di Aceh yang juga mempunyai kasus kekerasan sangat tinggi setiap berlangsungnya penyelenggaraan Pilkada.

berdasarkan uraian dilatar belakang, maka penulis menarik untuk melakukan penelitian tentang “Dampak Kekerasan Pemilu Terhadap Partisipasi Politik”.

¹ The Aceh Institut Banada Aceh. Febuari 2019

² *Ibid* .

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh kekerasan pilkada terhadap partisipasi politik masyarakat pada PILKADA 2017 Di pidie
2. Apa saja faktor yang menyebabkan menurunnya kekerasan Di pidie pada PILKADA 2017

1.3. Tujuan Masalah

1. Untuk Mengetahui bagaimanakah pengaruh kekerasan pilkada terhadap partisipasi politik masyarakat pada PILKADA 2017
2. Untuk Mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan menurun terjadinya kekerasan pada PILKADA 2017

1.4. Manfaat Penelitian

Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap masyarakat mengenai bagaimana dampak dan pengaruh yang ditimbulkan apabila adanya kekerasan dalam penyelenggaraan pilkada supaya masyarakat dewasa dalam memilih siapa yang pantas dipilih tanpa pemaksaan dan itu akan berdampak positif dalam meurunkan angka kekerasan di Aceh

1.5. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pendukung dalam penulisan skripsi peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulunya

Penelitian pertama berjudul *Kekerasan Pemilu di Aceh: Melihat Korelasi Antara Demokrasi dan Perdamaian* oleh Cut Maya Aprita Sari, S.Sos.,M.Soc.Sc Dosen Prodi Ilmu Politik, FISIP Unsyiah Banda Aceh Penelitian ini membahas tentang demokrasi tidak menjamin adanya perdamaian. Dalam kerangka sistem yang demokratis justru konflik berlatar belakang penyalahgunaan kuasa sangat mungkin terjadi. Keadaan ini menyebabkan korelasi positif antara demokrasi dan perdamaian semakin dipertanyakan. PEMILU sebagai instrument demokrasi faktanya justru memicu berbagai konflik dan insiden kekerasan Berkaitan dengan hal ini, Aceh merupakan daerah dengan potensi konflik yang tinggi menjelang Pilkada. Korelasi positif antara demokrasi dan perdamaian tidak terwujud di Aceh. Melihat eskalasi konflik yang meningkat menjelang pemilu tahun 2014, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa kekerasan akan kembali terjadi pada PEMILU tahun 2017 mendatang.³

Penelitian kedua oleh Ari Phradana Wati yang berjudul kekerasan politik dan kerusuhan sosial dalam skripsinya *menjelaskan bahwa telah terjadi ketidakseimbangan komunikasi antar lintas politik yang akhirnya menimbulkan kekerasan yang menjurus ke anarkisme secara struktural*, tetapi bagi kandidat hal ini merupakan bagian dari solusi politik, karena beberapa fakta menjelaskan bahwa premanisme lebih efektif dari kampanye termasuk pemaksaan kehendak. Oleh karena itu, berdasarkan teori Habermas, maka konsep masyarakat komunikatif menjadi alternatif yang mampu melahirkan konsensus baru yang

³ Cut Maya Aprita Sari, *Kekerasan Pemilu di Aceh*. September 2018. Diakses pada tanggal 20 Febuari 2019 dari situs : <https://www.researchgate.net/publication/327667912>

harus ditaati dalam proses politik untuk menguraikan kekerasan dan kerusuhan sosial dalam pilkada⁴

Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan untuk memahami dan mengetahui perbedaan dan perbandingan jumlah kekerasan pilkada setiap pelaksanaan pilkada, akibat dari kekerasan tersebut dapat mempengaruhi masyarakat untuk tidak ikut berpartisipasi dalam Pilkada



⁴Ari Pradhanawati, *Kekerasan politik Dan Kerusuhan Sosial Dalam Pilkada*. Diakses pada 22 Febuari 2019 dari situs : <https://media.neliti.com/media/publications/218244>

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1. Teori Partisipasi Politik

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi dugaan yang mendasari demokrasi dan partisipasi orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan masyarakat maka masyarakat berhak untuk ikut serta menentukan isi keputusan politik. Dan oleh karena yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan dan kebijakan apapun yang dilakukan pemerintah yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya.⁵

Berikut ini dikemukakan sejumlah rambu-rambu partisipasi politik.

1. Partisipasi politik yang dimaksudkan berupa kegiatan atau perilaku luar individu warga negara biasa yang dapat diamati, bukan perilaku dalam yang berupa sikap dan orientasi. Hal ini perlu ditegaskan karena sikap dari orientasi individu tidak selalu termanifestasikan dalam perilakunya.
2. Kegiatan itu diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksanaan keputusan politik. Termasuk ke dalam pengertian ini, seperti kegiatan mengajukan alternatif kebijakan umum, alternatif

⁵ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia, 2007), hlm. 140.

pembuat dan pelaksana keputusan politik, dan kegiatan mendukung ataupun menentang keputusan politik yang dibuat pemerintah.

3. Kegiatan yang berhasil (efektif) maupun yang gagal mempengaruhi pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik.
4. Kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Kegiatan yang langsung berarti individu mempengaruhi pemerintah tanpa menggunakan perantara, sedangkan secara tidak langsung berarti mempengaruhi pemerintah melalui pihak lain yang dianggap dapat meyakinkan pemerintah. Keduanya termasuk dalam kategori partisipasi politik.
5. Kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan melalui prosedur yang wajar (konvensional) dan berupa kekerasan (*nonviolence*), seperti ikut memilih dalam pemilihan umum mengajukan petisi, melakukan kontak tatap muka, dan menulis surat, maupun dengan cara-cara di luar prosedur yang wajar (tak konvensional) dan berupa kekerasan (*violence*), seperti demonstrasi (unjuk-rasa), masyarakat ini pembangkangan halus. (seperti lebih memilih kotak kosong daripada memilih calon yang disodorkan pemerintah), huru-hara, mogok pembangkangan sipil serangan bersenjata, dan gerakan-gerakan politik seperti kudeta dan revolusi.⁶

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi Skaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Secara

⁶ *Ibid.*, hlm. 141.

umum dalam masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa, keterlibatan warga negara dalam ikut serta mempengaruhi pengambilan keputusan, dan memengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil. Warga negara yang hanya terdiri dari masyarakat sederhana cenderung kurang diperhitungkan dalam proses-proses politik.⁷

Partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu roda pemerintahan. Dalam suatu PEMILU misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki sesuatu yang diutamakan dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu PEMILU tergantung pada pilihan masyarakat sebagai pemilih. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam PEMILU dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara. Wujud dari pemenuhan hak-hak politik adalah adanya kebebasan bagi setiap warga untuk menyatakan segala pendapat dan berkumpul.

Faktor yang mendorong partisipasi politik antara lain ialah:

1. Tingkat pengetahuan, pengetahuan terhadap politik sangat penting, hal ini dapat mempengaruhi apakah ia akan ikut serta dalam politik atau sebaliknya. Dengan pengetahuan yang baik, tentunya orang akan lebih

⁷ Sudijono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*, (Semarang: IKIP Semarang Press, 1995), hlm. 56.

mudah memahami pentingnya politik dan ikut serta di dalamnya. Sebaliknya, ketika seseorang memiliki pengetahuan yang sedikit akan politik, maka ia akan acuh dan tidak peduli terhadap politik.

2. Pekerjaan masyarakat, tingkat pengetahuan dan pekerjaan masyarakat ini merupakan faktor internal, atau faktor yang berasal dari dalam masyarakat. Biasanya orang dengan jenis pekerjaan tertentu membuat mereka dapat menjadi lebih peduli terhadap politik, atau malah sebaliknya, menjadi lebih jauh dari partisipasi politik. Misalnya, seorang guru umumnya memiliki tingkat kepedulian terhadap politik dibandingkan pemulung.
3. Tingkat pendidikan, selain dua faktor sebelumnya, tingkat pendidikan juga termasuk dalam faktor internal. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik juga memahami politik itu sendiri. Terlebih bagi pemilih yang buta huruf, akan sangat sulit baginya ketika mengenali calon pemimpin atau wakil rakyat atau sulit pula ketika pemungutan suara berlangsung.
4. Peran aparat pemerintah, salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi partisipasi politik adalah peran aparat pemerintahan. Mereka seharusnya memberikan edukasi pada masyarakat terkait politik dan mempermudah akses terhadap pengetahuan atas politik tersebut. Penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Indenpenden harus dapat mengakomodasi para pemilih, termasuk pemilih yang berkebutuhan khusus

5. Pengaruh kaum intelektual, di era informasi ini, sangat mudah rasanya menyebarkan berbagai ide, pikiran, gagasan, dan sebagainya. Banyak di antara kaum intelektual bidang politik yang menyampaikan opininya terhadap suatu permasalahan politik tertentu di berbagai media. Bagi para konsumen media, hal tersebut dapat meningkatkan partisipasi politik mereka, atau bahkan sebaliknya, membuat mereka semakin antipati terhadap politik.
6. Banyaknya partai politik di Indonesia dan berbedanya tujuan serta metode mereka dalam mencapai tujuannya, akan banyak terjadi konflik politik. Para pemimpin politik berlomba untuk mendapatkan dukungan dari rakyat yang sebesar-besarnya. Kader-kader mereka nantinya akan merekrut sebanyak-banyaknya warga negara untuk memberikan dukungan pada pemimpin mereka. Hal ini tentunya dapat meningkatkan partisipasi politik dalam suatu negara.⁸

⁸ Ranty Fatya Utami, *Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik*, 12 September 2017. Diakses pada tanggal 25 Oktober dari situs: <https://gurupkn.com/faktor-yang-mempengaruhi-partisipasi>

2.2. Tipologi Partai politik

Partisipasi politik terbagi menjadi dua yaitu partisipasi aktif dan partisipasi⁹ pasif. Partisipasi aktif adalah mengajukan usulan mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin. Sebaliknya, kegiatan yang termasuk dalam kategori partisipasi pasif yang menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan dan kebijakan apa saja yang dilakukan pemerintah itu berupa baik dan buruk dan tidak mau tau apapun tentang segala sesuatu yang ada didalam pemerintahan.

Dengan kata lain, partisipasi aktif berarti kegiatan yang berorientasi pada proses input dan output politik, sedangkan partisipasi pasif merupakan kegiatan yang berorientasi pada proses output. Di samping itu, terdapat sejumlah anggota masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori partisipasi aktif maupun partisipasi pasif karena mereka menganggap masyarakat dan sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang mereka cita-citakan kelompok disebut apatis atau golongan putih (golput).¹⁰

¹⁰ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, ... hlm. 142.

Partisipasi dapat pula dikategorikan berdasarkan jumlah pelaku, yakni individual dan kolektif maksudnya seseorang yang menulis surat berisi tuntutan atau keluhan kepada pemerintah atau kolektif. Partisipasi kolektif ialah kegiatan warga negara secara serentak untuk mempengaruhi penguasa seperti kegiatan dalam proses pemilihan umum.

Partisipasi politik kolektif dibedakan menjadi dua yaitu, partisipasi kolektif yang konvensional seperti kegiatan dalam proses pemilihan umum dan partisipasi kolektif yang tidak konvensional (agresif), seperti pemogokan yang tak sah, menguasai bangunan umum, dan huru-hara.

Lalu partisipasi politik kolektif secara agresif dibedakan menjadi dua yaitu aksi yang kuat dan aksi yang lemah. Aksi yang kuat dan lemah tidak menunjukkan sifat yang baik atau buruk dalam hal ini kegiatan politik dapat dikategorikan kuat apa bila memenuhi tiga kondisi berikut bersifat anti rezim dalam arti melanggar peraturan mengenai partisipasi politik yang normal (melanggar hukum) mengganggu fungsi pemerintahan, dan harus merupakan kegiatan kelompok yang dilakukan oleh non elit.

Aksi protes yang dibenarkan oleh hukum tidak termasuk ke dalam kategori partisipasi politik agresif seperti pemboikotan dan pemogokan buruh biasa tanpa tujuan politik apabila partisipasi politik yang agresif tidak mengandung kekerasan, kegiatan ini disebut pembangkangan warga negara (*civil disobedience*) seperti

penolakan wajib militer sebaliknya, apabila kegiatan itu mengandung kekerasan politik (*political violence*), seperti pembunuhan politik.¹¹

2.3. Teori Kekerasan dalam pemilu

Kekerasan merupakan kegiatan untuk mempengaruhi proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum tiada lain sebagai upaya untuk mendapatkan atau mempertahankan nilai-nilai. Dalam memperjuangkan upaya itu serigkali terjadi perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan, bahkan pertentangan yang bersifat fisik diantara berbagai pihak. Dalam hal ini antara pihak yang berupaya mendapatkan nilai-nilai dan mereka yang berupaya keras mempertahankan apa yang selama ini telah mereka dapatkan, antara pihak yang sama-sama berupaya keras untuk mendapatkan nilai-nilai yang sama dan pihak yang sama-sama mempertahankan nilai-nilai yang selama ini mereka kuasai.

Perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan, bahkan pertentangan dan perebutan dalam upaya mendapatkan dan mempertahankan nilai-nilai disebut konflik. Oleh karena itu menurut pandangan konflik, pada dasarnya politik adalah konflik. Pandangan ini ada benarnya sebab konflik merupakan gejala yang serba hadir dalam masyarakat, termasuk dalam proses politik. Selain itu, konflik merupakan gejala yang melekat dalam setiap proses politik.

Akan tetapi, konseptualisasi ini tidak seluruhnya tepat. Hal itu disebabkan, selain konflik, konsensus, kerja sama, dan integrasi juga terjadi dalam hampir semua proses politik. Perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan, dan

¹¹ *Ibid.*, hlm. 143.

pertentangan untuk mendapatkan atau mempertahankan nilai-nilai itu justru diselesaikan melalui proses dialog sehingga sampai pada suatu konsensus maupun diselesaikan lewat kesepakatan "dalam bentuk keputusan politik yang merupakan pembagian nilai- nilai. Oleh karena itu, keputusan politik merupakan upaya penyelesaian konflik politik.

Kelemahan lain. dari konseptualisasi ini ialah konflik tidak semua berdimensi politik sebab selain konflik politik terdapat pula konflik pribadi, konflik ekonomi, konflik agama, yang tidak selalu diselesaikan melalui proses politik. Apabila konflik- konflik yang disebutkan belakangan ini berkaitan dengan pemerintah atau diselesaikan melalui proses politik maka konflik- konflik yang semula tidak berdimensi politik berkembang menjadi konflik politik.¹²

Kekerasan dalam pemilu atau kekerasan PEMILU, jika mengikuti istilah yang digunakan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), adalah tindakan yang menyebabkan cedera atau kehilangan nyawa seseorang atau rusaknya barang kepemilikan seseorang maupun itu seperti milik pribadi/publik atau ancaman/paksaan fisik/pembunuhan yang berkaitan dengan hak politik warga dalam konteks kepemiluan. Kekerasan pemilu atau *election violence* tidak sama ataupun berbeda dengan pelanggaran PEMILU atau *election violations*, sebab kekerasan PEMILU merupakan kejahatan kriminal sehingga masuk dalam kategori :tindak pidana.¹³

¹² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, ... hlm. 9.

¹³ Amalia Salabi, *Menyoal Kekerasan Dalam Pemilu*. Maret 2019. Diakses pada tanggal 12 Oktober dari situs : <http://rumahpemilu.org/menyoal-kekerasan-dalam-pemilu-apa-sebab-dan-bentuknya/>

Kekerasan secara langsung ialah kekerasan yang dilakukan secara langsung mencelakai fisik orang tersebut kekerasan langsung bisa bermacam-macam bentuknya. Dalam bentuk yang melibatkan penggunaan kekuatan fisik, seperti pembunuhan atau penyiksaan pemerkosaan dan kekerasan seksual juga pemukulan. kekerasan verbal, seperti penghinaan, secara luas juga diakui sebagai kekerasan juga sering berlangsung setiap penggelaran pesta demokrasi yang berlangsung.

Kekerasan PEMILU terbagi atas tiga bentuk yaitu:

1. kekerasan fisik, yakni kekerasan yang mengakibatkan seseorang kehilangan nyawa atau terluka.
2. pengrusakan, baik terhadap fasilitas publik maupun property pribadi.
3. ancaman, yaitu ancaman kekerasan

Pembagian kategori tersebut didasarkan pada Pasal 280 ayat (1) huruf f dan g Undang-Undang (UU) Pemilu. Aturan itu melarang pelaksana, peserta, dan tim kampanye untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan peserta PEMILU yang lain pun melarang merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye (APK) peserta PEMILU.

Sanksi atas tindak kekerasan PEMILU tertuang dalam Pasal 511 dan 531 UU Pemilu. Pasal 511 memberikan sanksi pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah bagi setiap orang yang melakukan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan

yang ada padanya, menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih. Sedangkan Pasal 531 menghukum setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara, dengan sanksi pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah.¹⁴

Kekerasan pemilu terjadi akibat petahana yang melibatkan militer ataupun segala sesuatu untuk melawan oposisi, dan penyertaan identitas kelompok yang disertai dengan ujaran kekerasan. Di Indonesia, ada sedikitnya tiga penyebab kekerasan pemilu yaitu karna situasi politik lokal yakni berkaitan dengan kemerdekaan politik, pengerahan massa oleh elit politik yang tak menerima proses dan hasil pemilu, dan ketidakpercayaan terhadap integritas KPU.

Salah satu juga pemicu kekerasan pemilu ialah juga karena adanya penyebaran hoax atau mis informasi berharap agar masyarakat dan semua pihak tidak langsung mempercayai segala informasi dan harus pandai dalam menyaring informasi agar tidak mengakibatkan timbulnya kekerasan dalam pemilu agar tentram dan damai dalam melaksanakan pemilu yang selalu menjadi dambaan setiap orang untuk bebas melakukan pemilihan umum dengan baik.

¹⁴ *Ibid.*

Situasi penyebaran ancaman, teror, dan pembunuhan jika terus terjadi juga akan mendeligitimasi kualitas otonomi hak politik rakyat Aceh, yang idealnya harus bebas dari berbagai macam ketakutan dan benar-benar harus merasa aman.¹⁵



¹⁵ Rahmat Fadhil. dan T.M. Jafar Sulaiman. *Dominasi Politik Kekerasan dalam politik Aceh.* (Aceh 2014), hlm. 3

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1. Dasar Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dimana pendekatan penelitian kualitatif perhatiannya lebih banyak ditujukan pada pembentukan teori substantif berdasar dari teori konsep-konsep yang timbul dari data empiris. mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan atau tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti melakukan penelitian pada latar alamiah, maksudnya peneliti melihat dan sesuai apa yang terjadi di lapangan. Data deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta objek atau subjek yang diteliti secara tepat dan baik

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan atau dimana tempat seseorang peneliti untuk melakukan penelitian dalam hal untuk mempertanggung jawabkan segala data yang diperoleh dari hasil tempat penelitian yang dilakukan oleh si peneliti. Lokasi penelitian yang dilaksanakan di Aceh tepatnya terletak di Kabupaten Pidie. Alasan saya untuk melakukan penelitian di Pidie ialah karena jumlah kekerasan yang begitu tinggi di Aceh yang terletak di Pidie tersebut sehingga membuat saya tertarik dalam meneliti hal ini.

3.3.Fokus Penelitian

Penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan fokus penelitian dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusif-eksklusif atau memasukkan-mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan.

Fokus penelitian ini sangat membantu penelitian kualitatif dalam membuat keputusan untuk membuang atau menyimpan informasi yang diperolehnya. Hal itu dilakukan dengan jalan mengumpulkan data secukupnya yang mengarahkan seseorang kepada upaya memahami dan menjelaskannya.¹⁶

Berdasarkan konsep yang berada di atas, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah kekerasan pilkada terhadap pafrtisipasi politik di Kabupaten Pidie

3.4. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, data tambahan seperti dokumen dan bahan-bahan lainnya. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dihimpun dari dua sumber¹⁷

1. Sumber data primer, sumber data ini diperoleh dari para pembuat kebijakan

¹⁶ Lexy J. Moleong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdaya, 2002), hlm. 62.

¹⁷ Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 129.

2. Sumber data sekunder, sumber data ini diperoleh dari wawancara serta dokumen di Kantor Bawaslu, KIP, PA, PNA dan sebagainya yang berkaitan dengan data proses pengambilan kebijakan di Kabupaten Pidie serta kondisi aktual lokasi penelitian. Data sekunder ini diharapkan dapat menambah wacana dan wawasan yang lebih luas bagi peneliti sehingga hasil penelitian akan lebih tepat dan akurat.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Untuk menjawab permasalahan penelitian maka diperlukan pengumpulan data sebanyak mungkin dan informasi mengenai pembahasan dalam penelitian ini. Dalam Pengumpulan data ini didapatkan dari instansi KIP dan Bawaslu. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁸ Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi atau data berupa ucapan, pikiran serta gagasan. Dengan wawancara diharapkan informasi tentang penelitian ini dapat terungkap dan terekam oleh peneliti secara cermat.

2. Dokumentasi

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ... hlm. 135.

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.¹⁹Dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Teknik dokumentasi yang dilakukan yaitu dengan mencari, menemukan dan mengumpulkan catatan-catatan yang berkaitan dengan pilkada yang berlangsung di Pidie.

3.6. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Yang membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.²⁰

Metode pengukuran data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik pemeriksaan keabsahan data triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.²¹

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 231.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, ... hlm. 330

²¹ *Ibid.*, hlm. 178.

3.7. Metode Analisis Data

Analisis adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain²²

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.²³ Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data yaitu:

1. Pengumpulan data, dalam hal ini peneliti mencatat semua data secara obyektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan. Pencatatan data yang diperlukan terhadap berbagai jenis data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan serta melakukan pencatatan di lapangan.
2. Reduksi data (data reduction), reduksi data yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang

²² Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif, ...* hlm. 248.

²³ *Ibid.*, hlm. 247.

tidak perlu dan mengorganisasikan data sekunder sedemikian rupa sehingga dapat ditarik dan diverifikasi.²⁴

3. Penyajian data (data display), penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan analisis merancang deretan dan kolom-kolom dalam sebuah matriks untuk data kualitatif dan menentukan jenis dan bentuk data yang dimasukkan dalam kotak-kotak matriks.²⁵
4. Verifikasi data (conclusion drawing), verifikasi data adalah penarikan kesimpulan oleh peneliti berdasarkan analisis data penelitian. Kesimpulan adalah suatu tinjauan ulang pada catatan di lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang timbul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya yang merupakan validitasnya.²⁶

Tahapan analisis data dalam penelitian ini yakni pertama-tama peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara yang disebut tahap pengumpulan data. Oleh karena banyaknya data yang terkumpul, maka diadakan reduksi data setelah direduksi kemudian diadakan sajian data. Apabila ketiga tahapan tersebut selesai dilakukan, maka diambil kesimpulan atau verifikasi.

²⁴ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 247.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 249.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 252.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Konteslasi Politik dan Pilkada Pidie 2017

Kabupaten Pidie memiliki 23 kecamatan dan 732 gampong (dari total 243 kecamatan dan 5827 gampong di seluruh Aceh). Per tahun 2010 jumlah penduduk di wilayah ini adalah 378.278 (dari penduduk seluruh provinsi Aceh yang berjumlah 4.486.570) yang terdiri atas 183.675 pria dan 194.603 wanita (rasio 94,38). Dengan luas daerah 316.924 ha (dibanding luas seluruh provinsi Aceh 5.677.081 ha), tingkat kepadatan penduduk di wilayah ini adalah 133 jiwa/km² (dibanding kepadatan provinsi 78 jiwa/km²). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 437.740 jiwa dengan luas wilayahnya 3.086,95 km² dan sebaran penduduk 142 jiwa/km².²⁷

Pidie adalah salah satu kabupaten di provinsi Aceh, Indonesia. Pusat pemerintahan kabupaten ini berada di Sigli, kabupaten ini merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar ke 2 di provinsi Aceh setelah kabupaten Aceh utara. Dua pertiga masyarakat kabupaten ini ada di perantauan, buat masyarakat wilayah ini merantau adalah sebuah kebiasaan yang turun temurun untuk melatih kemandirian dan keterampilan. Masyarakat wilayah ini mendominasi pasar-pasar di berbagai wilayah di provinsi Aceh dan sebagian ke- provinsi sumatera utara

²⁷ Situs Pemerintahan Kabupaten Pidie, diakses pada 10 November dari situs: <https://pidiekab.go.id/kondisi-geografis/>

dan negara tetangga malaysia. Selain itu, wilayah ini juga terkenal sebagai daerah asal tokoh-tokoh terkenal Aceh.

Untuk melihat eskalasi konflik pada PILKADA Pidie, Menarik bila melihat dinamika dan konstelasi politik Pidie dan konstelasi pada pilkada tahun 2012 sampai dengan sekarang berikut peta konstelasi politik pada pilkada 2012.

**PEMETAAN KONTESTAN PILKADA PIDIE PADA
TAHUN 2012**

No	Pasangan Calon	Jalur	Partai Pengusung
1.	Ir.H Saiful Anwar Drs Sofyan Alibasyah	perseorangan/ Indenpenden	-
2.	Drs H Salman Ishak Syaifuddin Harun	perseorangan/ Indenpenden	-
3.	Drs Tgk H Yusri Ahmad DR Helmi M Agric Sc,	Perseorangan/ indenpenden	-
4.	DR Tgk H Gunawan Tgk Adami Gade	Perseorangan/ indenpenden	-
5.	Serjani Abdullah M Irawan SE	Partai politik	Partai Aceh
6.	Ir Masri Zainal Jlaur	Perseorangan/i ndenpenden	-
7.	HT Khairul Basyar SSOs Muhammad MTA	Partai politik	Partai Demokrat Partai Keadilan Sejahtera Partai SIRA

8.	Drs. Tgk. H Ghazhali Abbas Zulkifli HM Juned	Perseorangan/ ndependen	-
----	--	----------------------------	---

Dengan banyak jumlah pasangan calon bupati yang ada di Pidie Sehingga ini juga memungkinkan kekerasan yang terjadi antar pengusung Partai sehingga ini adalah salah satu bagian dari maraknya terjadinya kekerasan pada PILKADA 2012 saat itu kericuhan dan kecurangan pun tidak terhindarkan sehingga ini menjadikan masyarakat memilih pun bingung dengan pilihannya.

PEMETAAN KONTESTAN PILKADA PIDIE PADA 2017

Melihat pada tahun pilkada 2012 berbanding terbalik dengan pelaksanaan pilkada pada tahun 2017 yang dimana pada pasangan calon hanya memiliki tiga calon sehingga ini menarik untuk dilihat dan para para pengusung dari beberapa calon hanya satu pasangan calon saja yang memiliki mayoritas pengusung yaitu

No	Pasangan Calon	Jalur	Partai Pengusung
1.	Ir.H.T.Tarmiyus Khalidin Daud	Jalur perseorangan/ Indenpenden	-
2.	Roni Ahmad Fadhlullah T.M Daud	Jalur perseorangan/ Indenpenden	-
3.	H.Sarjani Abdullah M. Irawan, SE	Partai politik	PartaiAceh, Nasdem, Demokrat, Golkar, PKS, Gerindra, dan PDA

dari Partai lokal yaitu PA dan PDA dan partai nasional lain dan kedua pasangan calon lain yaitu Roni Ahmad jalur indenpenden tetapi ada bantuan dari partai PNA mendukung pasangan calon Abusyik tersebut. Dari partai pengusung PA dan partai nasional lainnya adalah salah satu menjadi calon kanidat yang kuat lantaran Serajani abdullah adalah petahana yang saat ini untuk kedua kali maju untuk mencalonkan diri sabagai calon bupati Pidie.

Pada tabel diatas memperlihatkan bahwa kontestasi dan peta kekerasan yang terjadi pada pilkada pidie didominasi oleh partai lokal, yaitu antara perseteruan PA dan PNA

Sejarah partai Aceh kemudian diawali oleh Pimpinan Partai Malik Mahmud yang memberikan surat mandat kepada Teungku Yahya Mu'ad SH pada tanggal 19 Februari 2007 untuk pembentukan partai politik lokal. Partai Aceh sebelumnya telah berganti nama sebanyak tiga kali. Awalnya Partai Aceh bernama Partai GAM yang didirikan dengan akta notaris tertanggal 7 Juni 2007 di Banda Aceh. Menurut juru bicara Partai GAM, Teungku Adnan Beuransyah, nama GAM hanya sebuah nama tanpa ada embel – embel lainnya. Tetapi bendera partai ini mirip dengan bendera yang dulunya digunakan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yaitu latar belakang merah menyala dan dua garis hitam di atas dan bawah, gambar bulan sabit dan bintang berwarna putih di bagian tengahnya.²⁸

:Partai ini didirikan pada Tanggal 24 April oleh mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Pada saat pendaftaran itu, Irwandi Yusuf sendiri tidak hadir.

²⁸ Devi Retno, *Sejarah Partai Aceh Sebagai Partai Lokal di Indonesia*, Maret 2019. Di akses pada tanggal 12 November 2019 : <https://sejarahlengkap.com/organisasi/sejarah-partai-aceh>

Mereka yang datang ke Kanwil Depkumham Aceh untuk menyerahkan dokumen persyaratan pendirian partai antara lain, Irwansyah alias Teungku Mukhsalmina (Mantan Panglima GAM Aceh Rayeuk), Muharram Idris (mantan Ketua KPA Aceh Rayeuk), Ligadinsyah (mantan juru bicara Partai Aceh/mantan Panglima GAM Linge), Amni bin Ahmad Marzuki (mantan juru runding GAM), Tarmizi, Lukman Age dan Thamren Ananda (mantan Sekjen Partai Rakyat Aceh). Proses pendaftaran ditandai dengan penyerahan dokumen kelengkapan persyaratan yang dilakukan oleh Mukhsalmina dan diterima oleh Kepala Divisi Administrasi pada Kanwil Depkumham Aceh, Syamsul Bahri.

Partai Nasional Aceh berlambang sebuah bintang putih besar yang dilingkari dua untaian padi di sisi kiri dan kanan dan masing-masing untaian padi terdiri dari 17 butir. Bintang besar warna putih memiliki pengertian sebagai cita-cita yang tinggi. 17 Butir padi pada masing-masing untaian teritorial sejarah perjuangan Aceh serta bermakna kemakmuran dan kesejahteraan. Sedangkan bintang besar melambangkan sebuah tumpuan harapan bagi rakyat Aceh yang bisa menerangi rakyat Aceh. Warna oranye dipilih karena bermakna kejayaan, keagungan, kebersamaan, dan kekuatan. Lima bintang kecil di atasnya memiliki pengertian sebagai lima rukun Islam²⁹

Hal itu berdampak pada proses pelaksanaan kepala daerah yang dimana pada pelaksanaan tersebut terdapat berbagai tindakan kekerasan hal ini yang mendasari bahwa pelaksanaan PILKADA yang buruk sehingga proses yang berlangsung di Aceh tidak terlepas dari kekerasan yang terjadi disetiap

²⁹ *Ibid.*

berlangsung pelaksanaan pilkada. Sejarah Aceh ini yang menjadikan alasan mengapa setiap berlangsungnya proses pilkada selalu dengan kekerasan.

4.2. Kekerasan Dan Partisipasi Politik Pada Pilkada Pidie 2017

Pidie pertama kali melaksanakan PILKADA pada tahun 2012 Pidie menjadi salah satu daerah dengan tingginya angka kekerasan karena ada beberapa alasan yaitu dengan berlatar belakang sejarah konflik dan juga menjadi sejarah indonesia dengan sejarah konflik yang begitu besar dan menelan beberapa korban mau itu kombatan GAM atau pun anggota militer indonesia. Pidie juga dikenal dengan daerah yang melahirkan anggota anggota GAM dan para mantan eks kombatan di daerah ini beberapa dari kita dengar dengan kekerasan yang terkenal beberapa isu mengenai kekerasan yang tinggi pada setiap berlangsungnya pilkada. Dari beberapa sumber yang mengatakan bahwa PILKADA Pidie 2017 lebih kondusif dari pada pelaksanaan PILKADA sebelumnya yang berdarah dari beberapa sumber data yang saya dapat dari hasil wawancara yang saya lakukan agar lebih detailnya bagaimana kekerasan PILKADA 2017 di Pidie dari beberapa instansi yang berkaitan dan sesuai dengan judul saya.

Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Seperti diketahui pada tanggal 27 Januari Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan KIP untuk kembali menjadwalkan tahapan pilkada. MK memberi batas waktu pelaksanaan suara hingga 9 April 2012. Keputusan MK ini mengabulkan permintaan KIP Aceh. Sebelumnya, KIP Aceh meminta MK untuk mengundurkan Pilkada Aceh yang semula dijadwalkan 16 Februari menjadi 9 April. Pasalnya, KIP menyatakan tak sanggup melaksanakan pemungutan suara pada 16 Februari karena membutuhkan waktu lebih lama untuk memverifikasi KTP dukungan calon independen.

Pada hari Minggu tepatnya pada tanggal 15 April di hotel Grand Blang Asan Sigli melaksanakan rapat pleno hasil pilkada. Dalam rapat tersebut menetapkan no urut 5 yaitu Sarjani Abdullah dan M Irawan sebagai Bupati terpilih 2012-2017. Ketua KIP Pidie, Junaidi Ahmad SAg mengatakan, penetapan pasangan yang diusung Partai Aceh (PA) sebagai Bupati Pidie dan Wakil Bupati Pidie terpilih itu setelah dilakukan serangkaian sidang perhitungan suara selama dua hari.

pada pilkada 2012 yang telah berlangsung terdapat beberapa aksi kekerasan yang dilakukan oleh beberapa oknum mauapun antar pengusung kedua partai ini menunjukkan bahwa ada beberapa tindakan kekerasan didalam proses berlangsungnya pada pilkada 2012 menurut beberapa dari informasi mengenai

bagaimana proses berlangsungnya pilkada 2012. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada pilkada 2012 ada banyak sekali di dalam sengketa Pemilukada terdapat beberapa pelanggaran PEMILU ataupun pelanggaran PEMILUKADA seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana, misalnya money politic, intimidasi, dan penganiayaan. Hingga mencapai 40 kasus yang telah dilaporkan kip berdasarkan hasil yang di dapat dari laporan masyarakat mapun dari beberapa pengusung partai yang ada di Pidie.

Walaupun KIP telah mengumumkan hasil rekapitulasi suara terhadap menangnya pasangan nomor urut 5 tetapi adanya yang keberatan dari pihak no urut 8 Drs.H. Ghazali Abbas Adan dan Zulkifli Adam juned telah melaporkan serangkain pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan oleh Serjani Abdullah dan Abdul irawan ke KIP. Dan ada juga beberapa laporan dari masyarakat maupun dari pihak pengusung tentang adanya kecurangan atau pengancaman disaat berlangsungnya penyelenggaraan pilkada

1. Bahwa berdasarkan laporan dari Balon Bupati/Wakil Bupati Pidie (Tgk. Ghazali Abbas Adan Zulkifli H.M Juned) tentang ancaman terhadap Balon Bupati/Wakil Bupati Pidie tersebut pada tanggal 17 Februari 2012, atas laporan tersebut, Panwaslu Kabupaten Pidie melakukan Kajian dengan Nomor 01/L/Panwaslu-Pidie/II/2012 tanggal 21 Februari 2012.
2. Bahwa berdasarkan laporan dari Balon Bupati/Wakil Bupati Pidie (Tgk. Ghazali Abbas Adan/Zulkifli H.M Juned) melalui pesan singkat (SMS) kepada Panwaslu Pidie pada tanggal 10 Maret 2012 tentang ancaman dari seseorang yang disampaikan oleh Geuchik (Kepala Desa) Blang

Bungong Kecamatan Tangse, bahwa apabila Partai Aceh tidak menang di desa tersebut akan diculik satu persatu masyarakat di desa tersebut, tidak dapat ditinjaklanjuti oleh Panwaslu Pidie karena tidak ada barang bukti dan tidak ada yang bersedia menjadi saksi.

3. Bahwa berdasarkan laporan dari Ketua Tim Kampanye Paslon Bupati/Wakil Bupati Pidie (Tgk. Ghazali Abbas Adan/Zulkifli H.M Juned) yang bernama Tgk. H. Zulkifli Taib kepada Panwaslu Pidie pada tanggal 17 Maret 2012 tentang perusakan baliho Paslon Bupati/Wakil Bupati Pidie tersebut oleh orang tidak dikenal,.
4. Bahwa berdasarkan laporan dari salah seorang pendukung Paslon Gubernur/Wakil Gubernur Aceh (Irwandi Yusuf/Muhyan Yunan) kepada Panwaslu Pidie pada tanggal 18 Maret 2012 tentang penganiayaan dan pengrusakan mobil Tim Kampanye Paslon Gubernur/Wakil Gubernur Aceh (Irwandi Yusuf/Muhyan Yunan) oleh salah seorang pendukung Partai Aceh yang bernama M. Nur alias Kapten Nu, atas laporan tersebut.
5. Bahwa berdasarkan laporan dari Ketua Tim Kampanye Paslon Bupati/Wakil Bupati Pidie (Tgk. Ghazali Abbas Adan/Zulkifli H.M Juned) yang bernama Tgk. H. Zulkifli Taib kepada Panwaslu Pidie pada tanggal 21 Maret 2012 tentang pelemparan batu dan pemukulan oleh Kader Partai Aceh bernama Abdul Gani terhadap pendukung Paslon Bupati/Wakil Bupati Pidie (Tgk. Ghazali Abbas Adan/Zulkifli H.M Juned) yang bernama Tadjeri Yahya.

6. Bahwa berdasarkan laporan dari Ketua Tim Kampanye Paslon Bupati/Wakil Bupati Pidie (Tgk. Ghazali Abbas Adan/Zulkifli H.M Juned) yang bernama Tgk. H. Zulkifli Taib kepada Panwaslu Pidie pada tanggal 22 Maret 2012 tentang pembakaran rumah pendukung Paslon Bupati/Wakil Bupati Pidie (Tgk. Ghazali Abbas Adan/Zulkifli H.M Juned) yang bernama Husaini yang beralamat di Gampong Meuenjee dan perusakan baliho Paslon Bupati/Wakil Bupati Pidie (Tgk. Ghazali Abbas Adan/Zulkifli H.M Juned) di Gampong Jurong Pande Kecamatan Glumpang Tiga yang dilakukan oleh orang tidak dikenal (OTK), tidak dapat ditinjaklanjuti oleh Panwaslu Pidie karena tidak diketahui pelaku/terlapor dan berada diluar tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten Pidie.

Tetapi dengan adanya laporan oleh pihak 08 yang dilakukan tidak kuat dan tidak dengan adanya bukti yang kongkrit sehingga tidak mempengaruhi hasil rekapitulasi yang telah di umumkan oleh pihak KIP yang mememangkan pasangan no urut calon 05 Sarjani Abdullah dan M irawan.

Begitu pula pada pilkada 2017. Walaupun intesitas kekerasan menurun terdapat riak konflik di daerah tersebut pertama ada kericuhan dan protes antar kedua kubu Debat kandidat tiga pasangan cabup dan cawabup Pidie di Hotel Grand Blang Asan Sigli, Selasa 10 Januari 2017 yang berujung ricuh kericuhan terjadi saat massa pendukung pasangan Roni Ahmad (Abuchik) dan Fadhlullah T M Daud keluar dari Hotel Grand Blang Asan. Di luar hotel ternyata massa pasangan Sarjani Abdullah dan M Iriawan berkumpul. tiba kericuhan pun -Tiba

satu pendukung Sarjani Abdullah terkena pukulan dalam ,Bahkan .terjadi .kericuhan tersebut

Kericuhan ini terjadi akibat Pihak KIP (komisi independen pemilihan) melarang pendukung pasangan calon bupati no urut 02 menggunakan kopiah merah, itu dianggap merupakan atribut pasangan Abusyik-Fadhullah. Malah, bukan saja pasangan calon kepala daerah itu yang selalu mengenakan kopiah merah akhir-akhir ini, tapi tim kampanye/tim sukses mereka pun ikut rutin mengenakan kopiah merah sebagai atribut/identitas. Kejadian itu memanas saat antar kedua pendukung sudah diluar ataupun dihalaman hotel Grand Blang Asan Sigli kejadian ricuh ini dihentikan oleh pihak keamanan maupun pihak kepolisian yang di lokasi tersebut. Dalam kejadian itu pihak penyelenggara menunda melakukan debat kandidat tersebut

KIP (Komisi Independen Pemilihan) Pidie jug memberikan sanksi kepada cabup (Calon Bupati) dan cawabup (Calon Wakil Bupati) Pidie, Roni Ahmad (Abusyik) dan Fadlullah dengan tidak mengikutsertakan dalam debat kandidat putaran II menyangkut atribut paslon telah disepakati bersama penghubung masing-masing cabup dan cawabup dalam technical meeting yang dilaksanakan 5 Januari 2017. Hal itu yang menjadi sorotan media sehingga besar beritanya hingga ke beberapa daerah berdasarkan data yang saya dapat mengenai isu itu yang sangat besar di Pidie tetapi ada juga hal-hal yang lainnya terjadi tetapi tidak seperti kejadian pada saat pelaksanaan tersebut Pemetaan dan polemik kekerasan yang menurun, membantu kemenangan pada Roni Ahmad atau biasa disebut Abusyik.

Berikut tabel perolehan suara pada pilkada 2017

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ir.H.T.Tarmiyus Fadhlullah T.M Daud	5.96%. 11.885 Suara
2.	Roni Ahmad Khalidin Daud	48.19% 96.511 Suara
3.	H.Sarjani Abdullah M. Irawan, SE	45.85% 91.511 Suara

Melihat perbandingan perolehan suara yang begitu signifikan antara 01 dan pasangan calon bupati lainnya bahwa pasangan calon nomor tidak begitu memiliki suara yang begitu mendekati perolehan suara tetapi pada pilkada 2017 ini di dominasi oleh pasangan calon 02 yaitu Roni Ahmad dan Khalidin Daud dengan perolehan yang tinggi, pada persaingan PILKADA yang berlangsung di Pidie ada dua kandidat pasangan calon yaitu antara 02 dengan 03 yang begitu memanas pada PILKADA yang berlangsung banyaknya kericuhan yang terjadi pada saat adu debat pada saat itu kubu 02 keluar dari perdebatan karna masalah hal penggunaan peci saat melakukan debat intensitas pada saat itu cukup memanas dan ada yang terluka dari kubu 03. Di sini bisa kita lihat bahwa pada pilkada 2017 ini di dominasi oleh kubu Roni Ahamad dan juga kubu dari 03 Sarjani Abdullah. Potret di atas berbeda dengan perolahan suara pada pilkada 2012

Berikut perolehan suara pada pilkada 2012

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ir.H Saiful Anwar Drs Sofyan Alibasyah	3,54% 7.820 Suara
2.	Drs H Salman Ishak Syaifuddin Harun	12,47% 27.526 Suara
3.	Drs Tgk H Yusri Ahmad DR Helmi M Agric Sc	3,09% 6.823 Suara
4.	DR Tgk H Gunawan Tgk Adami Gade	3,97% 8.780 Suara
5.	Serjani Abdullah M Irawan SE	60,13% 132.673 Suara
6.	Ir Masri Zainal	0,55% 1.299 Suara
7.	HT Khairul Basyar SSOs Muhammad MTA	6,29% 13.889 Suara
8.	DRS H Aghazali Abbas Zulkifli HM Juned	9,88% 21.819 Suara

Pada peroleh suara di atas bahwa pasangan Sarjani Abdullah dan M Irawan SE menang telak dengan perolehan suara yang begitu signifikan hingga mencapai perolehan suara 60% di bandingkan dengan perolehan suara para calon kanidat lainnya. Kita lihat bahwa persaingan antar kandidat lain tidak begitu sengit lantaran perbandingan perolehan suara yang begitu jauh. Jadi menurut saya disini bahwa yang menjadi permasalahan PILKADA pada 2012 ini yang begitu memanas adalah banyaknya insiden kekerasan atau pun kecurangan antara satu sama lain tetapi tidak dengan perolehan suara. Berbanding terbalik dengan PILKADA pada 2017 yang perolehan suaranya hanya beda 3% saja tetapi kurangnya insiden kekerasan pada saat pilkada 2017.

Menariknya dinamika kekerasan yang mulai menurun seperti data diatas berkorelasi terhadap angka partisipasi yang berbeda antara pilkada 2012 dan 2017.

Perolehan suara pada tahun 2012

No	Jumlah Data Pemilih Tetap			Tingkat Partisipasi Masyarakat		
	L	P	Jumlah	L	P	Total
1.	136.195	146.631	282.826	76.66	82.48	81.12

Berdasarkan data yang didapat dari KIP ini kita bisa melihat bahwa partisipasi pada tahun 2012 cukup baik dan memuaskan tetapi dengan memuaskannya partisipasi pada pilkada ini sangat di sayangkan bahwa juga ada insiden kekerasan sangat tinggi ini menjadikan permasalahan yang selama ini belum bisa diselesaikan oleh pihak pengamanan sehingga ini pelajaran bagi kita untuk bisa sama sama saling memberikan nasihat terkait baiknya untuk selalu bermain bersih dari adanya kekerasan.

Perolehan suara pada pilkada 2017

No	Jumlah Data Pemilih Tetap			Tingkat Partisipasi Masyarakat		
	L	P	Jumlah	L	P	Total
	144.226	154.385	298.611	66,49	73.49	70.09

Berdasarkan tabel diatas kita melihat bahwa adanya penurunan partisipasi dari masyarakat Pidie cukup disesalkan dan juga kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini penting nya untuk melakukan pemilihan demi kebaikan daerah

bersama disatu sisi ini juga menjadikan pilkada yang baik karena kurangnya kekerasan yang terjadi pada pilkada 2017 ini membuktikan bahwa adanya kesadaran dari masyarakat maupun yang lain pentingnya akan kenyamanan dalam melaksanakan pilkada.

Fenomena diatas menjadi telaah untuk melihat kekerasan yang menurun pada pilkada pidie 2017 dan kekerasannya terhadap tingkat partisipasi yang menurun. Berikut penjelasan dari salah satu Partai Aceh yang mengatakan

“Kita melihat kekerasan sangatlah berbahaya dan bisa saja kehilangan nyawa kita lihat bahwa Kedua PILKADA tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda pada saat pilkada tahun 2017 ini terlihat penyelenggaraannya relatif berlangsung secara damai jika dibandingkan dengan pilkada tahun 2012. PILKADA tahun 2017 sebenarnya juga tidak terlepas dari berbagai tindakan intimidasi, dan pada tahun 2017 lebih aman dan kondusif.”³⁰

“ Ada yang beranggapan bahwa pihak pendukung partai yang bertikai atau pun melakukan kekerasan antar sesama pengusung dugaan dari masyarakat tetapi di lapangan pihak kami tidak melakukan sama sekali kekerasan tersebut besar dugaan kuat kami ada pihak lain yang ingin merusak dan mempropaganda kami di tahun tahun Politik yang sedang memanas ini. Soal mengenai protes terhadap pelaksanaan itu soal yang wajar dan biasa dalam berpolitik apabila terjadinya kecurangan dalam penyelenggaraan tersebut dan setiap orang memiliki dan berhak untuk melakukan protes.

Dari penjelasan dengan wawancara yang dilakukan yang diatas bahwa pihak dari PA ini kita memang betul sangat berbahaya apabila kekerasan terus marak di Aceh ini menjadikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita bahwa kekerasan bukanlah salah satunya cara untuk memenangkan pasangan calon

³⁰ Hasil wawancara dengan Anggota PA, Kabupaten Pidie Pada Tanggal 31 Oktober 2019

alangkah baiknya dengan visi misi yang berkualitas sehingga masyarakat tertarik untuk memilih dan disini juga kita menduga ada pelaku lain di balik yang mengadu domba Aceh sehingga terjadilah kesalahpahaman antar sesama pendukung maka dari itu mari memberikan yang terbaik demi kenyamanan bersama tanpa adanya kekerasan dan intimidasi dari pihak manapun. Berbeda halnya dengan penjelasan dari PNA sebagai berikut

“Biasanya kekerasan diakibatkan oleh persaingan antar kandidat pilkada dan umumnya terjadi dilapangan antara timses A dan timses B itu terjadi dilapangan orang biasanya sudah tau kekerasan setiap berlasungnya pilkada pasti terjadinya kekerasan pidie aceh utara dan lain lainnya. Hal yang wajar dan biasa terjadi kekerasan atau hal lainnya itu di dalam pelaksanaan pilkada pada tahun 2012 itu kekerasan udah ke fisik dan pada 2017 menjadi lebih baik dan kondusif ada beberapa tetapi tidak seperti yang terjadi pada tahun 2012 yang menelan korban dan lainnya Kalau orang tahu bahwa Aceh ini pernah terjadi konflik dan kita tahu semua beberapa mantan kombatan terjun kedunia politik dan masuk kedalam beberapa partai kita tahu hal itukan.”³¹

Dari hasil wawancara diatas berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh PNA terkait tentang kekerasan memang juga terlihat bahwa pengambilan kursi politik di Aceh saat ini mayoritas mantan kombatan yang menguasainya tetapi dengan pilkada 2017 saat ini memang lebih kondusif dan ini menjadikan modal yang baik bagi kita semua agara PILKADA selanjutnya akan lebih baik lagi dan ini semua jadi impian kita semua dan saat ini dari beberapa partai juga sadar akan hal kekerasan ini tidak baik bagi seluruh rakyat Aceh.

³¹ Hasil wawancara dengan Seketaris PNA, Pada Tanggal 31 Oktober 2019

Berbeda juga dengan beberapa penjelasan di atas oleh bapak Junaidi, s.Ag MH
Selaku Devisi Hukum data dan Informasi di kantor Bawaslu

“Kita tahu semua tahu bahwa pilkada yang berlangsung di Aceh khususnya di pidie juga banyak yang melakukan kekerasan maupun kecurangan setiap berlangsungnya itu berdasarkan pengalaman yang saya tahu bahwa kita mempunyai sejarah kelam yaitu konflik yang terjadi itu bisa menjadi salah satu alasan mengapa kekerasan sering terjadi di aceh.

“Dalam pilkada ini yang saling berhadapan ada dua kubu ini dan ada hal yang membuat protes terhadap panitia pelaksana soal kasus ijazah tetapi tidak terlalu signifikan didalam pelaksanaan pilkada ini karena adanya kesigapan penanganan dari pihak kepolisian ada hal-hal lainnya kekerasan pengancaman bukan untuk pemilih tetapi dari pendukung siapa yang aktif dilapangan dia sudah bekerja kampanye, sosialisasi, dan meyakinkan kan orang orang ya bekerja seperti ini sedikit punya potensi akan di pantau oleh pendukung calon yang lain mereka akan di hadang dengan cara cara mereka sendiri kekerasan ini tidak langsung pada pemilih tetapi antar timses³².

Ini memang sulit bagi kita semua untuk terlepas dari kekerasan karena berdasarkan sejarah kelam Aceh yang memiliki riwayat konflik yang begitu besar sehingga mungkin ini yang mempengaruhi kita dalam melakukan tindakan kekerasan dan ini juga akan menjadi boomerang untuk kita jika tidak memberikan perubahan terhadap pelaksanaan pilkada dan saya juga berharap dari pihak

³² Hasil wawancara dengan BAWASLU Pidie, Junaidi S.Ag MH Pada Tanggal 1 November 2019

pengamanan harus lebih agresif lagi dalam menangani tindakan kekerasan ini demi keberlangsungan yang baik.

Berikut juga penjelasan yang di berikan daripihak KIP mengenai prihal kekerasan yaang tarjadi di Pidie berikut penjelasannya

“ Dan kita tahu semua bahwa kekerasan sangat berbahaya bagi masyarakat yang menggunakan kekerasan dalam berlasungnya PILKADA tetapi pada tahun ini kekerasan begitu menurun dan signifikan tapi masih ada beberapa loporan mengenai hal itu tapi jika di bandingkan dengan pilkada sebelumnya sangat miris mengenai kekerasan adanya laporan kekerasan tetapi terlalu mengkhawatirkan dan berbahaya Yang bergesekan dalam pilada 2017 hanya dari kubu PNA dan PA tetapi juga ini tidak begitu berbahaya dan juga tidak menelan korban hanya saja cekcok antara kubu 02 dan kubu 03 di dalam berlangsung nya pilkada tetapi itu tidak berdampak pada pemilih di pidie tetapi antar pengusung partai³³.

Kekerasan begitu melekat dan begitu terdengar wajar dan biasa bagi masyarakat Aceh khususnya Pidie apalagi setiap berlangsungnya pilkada ini diwilayah pidie menjadi salah satu jumlah kekerasan yang tinggi dan gesekan ini sering terjadi di Pidie yaitu antara kubu partai lokal yaitu PA dan PNA yang dimana setiap berlangsungnya pasti mereka yang sering bertikai kita melihat dari pilkada sebelum sebelumnya tetapi ini juga sudah mulai membaik dan dengan kesadaran dari pihak PA maupun PNA

Berikut Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat juga terkait dengan kekerasan yang terjadi di Pidie

³³ Hasil wawancara dengan Komisioner KIP, Kabupaten Pidie, Pada tanggal 30 Oktober 2019

“Mengenai kekerasan yang telah terjadi beberapa tahun lalu dengan adanya kekerasan jelas itu menjadi kekhawatiran bagi beberapa masyarakat khususnya Pidie dengan adanya kekerasan yang terjadi itu bisa saja mempengaruhi suara masyarakat dalam memilih siapa yang pantas untuk dipilih tetapi pada tahun 2017 ini saya melihat terjadinya penurunan kekerasan maupun ancaman beberapa pihak ada juga tetapi tidak terlalu mengganggu kami sebagai masyarakat kalau hal kejadian protes atau adu mulut antar kubu partai itu hal biasa dan wajar setiap berlangsungnya PILKADA.”³⁴

Bahwa disini jelas masyarakat juga merasakan kekhawatiran dan ketakutan dengan adanya kekerasan yang terjadi setiap berlangsungnya pilkada ini menjadikan masyarakat takut untuk memberikan hak suaranya yang sesuai dengan hati nuraninya dan visi misi yang baik dari pasangan calon bupati pidie ini untuk memilih yang pantas untuk dipilih maka dari masyarakat berharap banyak bagi pemerintah untuk menjadi PILKADA yang aman bagi masyarakat Pidie. Sehingga masyarakat dapat memberikan hak suara yang pantas pantas bukan dengan kekhawatiran dan dengan rasa terancam dalam memilih.

Salah satu wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang partisipasi menurut salah satu dari pengurus Partai Aceh

“Menurut saya bahwa dengan berdasarkan data bahwa telah terjadinya penurunan partisipasi politik itu bukan dikarenakan kekerasan tetapi mungkin ada alasan dibalik itu mungkin dugaan saya mengenai itu karna ada hal yang

³⁴ Hasil wawancara dengan Masyarakat, Kabupaten Pidie, Pada Tanggal 01 November 2019

lebih penting dan juga ada mungkin ada pekerjaan yang tidak bisa di tinggalkan dari pada menghadiri pilkada tersebut dan mungkin banyak hal lainnya yang membuat masyarakat tidak hadir dalam pemilihan kepala daerah tersebut. Kita tahu semua bahwa kita menginginkan partisipasi PILKADA yang jumlahnya tinggi mungkin kita tentu menginginkan semua itu tetapi mungkin ada alasan dan kendala lain sehingga mereka tidak hadir.

Berdasarkan hasil wawancara diatas adalah memang betul dengan menurun nya jumlah partisipasi itu kemungkinan memang bukan hanya berbicara kekerasan sehingga terjadinya penurunan tetapi itu juga di sebabkan oleh beberapa alasan terkait tentang penurunan partisipasi itu bisa saja karna ada hal yang lebih penting dan menyakut masalah hal lainnya yang terpaksa harus mengenyampingkan PILKADA tersebut.

Begitu pula hasil wawancara yang saya lakukan dengan Seketaris Partai Nasional Aceh

“Banyak orang menduga duga bahwa penurunan partisipasi yang terjadi di Pidie yang di akibat oleh kekerasan itu saya kira kurang tepat bahwa terjadinya penurunan partisipasi yang ada Pidie itu bukan berbicara kekerasan tetapi banyak faktor faktornya mungkin karna mereka belum memahami arti sebuah pilkada yang kita selenggarakan ataupun pemahaman masyarat Pidie tentang politik masih minim sehingga ini juga menjadikan alasan utama terjadi penurunan tingkat partisipasi ataupun banyak hal lain mungkin bisa saja sakit atau tidak adanya alat transportasi untuk pergi ke Tps saya kira ini juga yang menjadikan alasan menurunnya jumlah partisipasi yang ada di pidie.

Menurut saya beliau juga ada benarnya bahwa penurunan partisipasi yang terjadi semata mata bukan hanya karena adanya kekerasan tetapi juga ada faktor lain yang menjadikan penurunan partisipasi yang terjadi di Pidie tersebut karena kita tahu bersama bahwa suatu wilayah termasuk sukses dalam menyelenggarakan pilkada apabila jumlah partisipasinya yang cukup tinggi pada intinya bahwa partisipasi terjadinya penurunan karena memiliki faktor lain selain kekerasan.

Begitu juga dengan wawancara saya lakukan dengan salah satu komisioner yang ada di KIP

“Terkait dengan penurunan partisipasi yang terjadi di Pidie mungkin kendala di sosialisasi pilkada karena menggunakan dana hibah dari pemda suport dari dana dari pemerintah agak kurang karena anggaran sehingga membuat kami bersosialisasi terbatas ada beberapa segmen antara lainnya pemilih pemula dan masyarakat marginal di pinggiran-pinggiran laut atau pinggir gunung misalnya yang tidak percaya pencapaian pemimpinnya kami masih gini gini aja menang juga gak berpengaruh kok terhadap nasib kami pemikiran masyarakat marginal sehingga mereka sibuk dengan pekerjaan mereka masing masing Perlu penguatan kapasitas dan jaringan komisioner.

Ini juga bisa menjadi alasan yang tepat mungkin kurangnya perhatian pemerintah pusat terhadap KIP untuk memberikan anggaran yang cukup untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat-masyarakat yang kurang memiliki pengetahuan tentang pilkada sehingga ini juga menjadi tugas kita semua untuk sama sama melakukan ajakan untuk memilih bukan hanya jadi beban KIP ataupun Pemerintah.

Berbeda pula tanggapan yang di sampaikan oleh pihak bawaslu mengenai partisipasi berikut ini hasil wawancara yang saya lakukan

“Karna penurunan partisipasi tidak hanya bicara tentang kekerasan ada juga dari berbagai hal dan juga banyak faktor lain terjadinya penurunan banyak faktor pertama mungkin faktor dari kekecewaan masyarakat yang dulu nya sudah aktif tetapi tidak ada dampak perubahan dan ada juga faktor calon bagi orang pemilih cerdas apabila mereka melihat tidak ada yang menarik dari calon

Memang betul bahwasanya berbicara mengenai penurunan partisipasi yang terjadi bukan hanya berbicara karna adanya kekerasan tetapi banyak faktor yang menjadikan penurunan partisipasi faktor yang dulunya aktif dalam mendukung salah satu partai yang diusung tidak memberikan hasil yang maksimal saat sudah menduduki kekuasaan sehingga tidak jarang kita lihat banyak yang juga tidak lagi mengikuti karena dasarnya kekecewaan masyarakat.

Hasil wawancara yang saya lakukan dengan masyarakat Pidie terkait tentang partisipasi

“ini merupakan pemilihan ataupun pemilu pada tahun yang telah berlalu, ini kemudian salah satu yang membuat partisipasi di pidie ini menjadi tertekan dan menurun bahwa ini ada orang orang yang bermain antar kelompok pengusung partai bahwa kontestan ini didisain atau pun diriset hanya boleh menang ataupun dikuasai oleh salah satu partai ataupun salah satu kelompok saja ini membuat masyarakat sangat resah dalam tanda kutip “ untuk memilih sesuai hati nuraninya” jadi ini menjadi hal penting adanya pencegahan ataupun

antisipasi baik dari pihak keamanan polri masyarakat agar masyarakat lebih terbuka dan tidak ada kekhawatiran pergi ke TPS

ini juga menjadi alasan yang menarik karna memang dengan keinginan yang begitu besar hasratnya untuk menduduki kursi kepemimpinan sehingga melakukan segala cara untuk mendapatkannya. Sehingga masyarakat juga menjadi sasaran yang pantas untuk mendapatkan kemenangan berdasarkan data kita lihat banyak acaman agar masyarakat memilih mereka yang melakukan ancaman tersebut sehingga itu juga yang memicu masyarakat takut pergi menggunakan suaranya.

4.3 Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Menurunnya Kekerasan

Ketika kita berbicara tentang menurunnya kekerasan itu menjadikan kabar baik buat kita semua bahwa mungkin ada kesadaran dari kita semua untuk menjadikan penyelenggaraan ini lebih baik apa lagi kita melihat daerah Aceh adalah salah satu merupakan basis wilayah mantan anggota Gerakat Aceh Merdeka apalagi ketika mendengar adanya penurunan kekerasan itu menjadi kabar gembira bagi kita semua dan yang sudah kita nantikan sejak lama.

Wawancara yang dilakukan kepada pengurus PA terkait rentang menurunnya kekerasan yang ada di Pidie

“Menurut saya mengenai menurunnya jumlah kekerasan yang ada diPidie itu memperlihatkan begitu sudah mulai membaik pelaksanaan pilkada yang dilakukan dipidie kiita sama-sama juga mengiginkan hal itu bukan saya saja tetapi juga kita semua yang ada di Pidie banyak berharap agar PILKADA yang selanjutnya untuk

*lebih baik lagi jauh dari kekerasan agar masyarakat lebih leluasa untuk memilih yang sesuai dengan hati nurani mereka*³⁵

Kabar baik buat kita semua bahwa penurunan tingkat kekerasan yang terjadi di Pidie mulai membaik ini menjadikan modal yang baik bagi kita semua untuk memberikan yang terbaik agar pelaksanaan PILKADA berjalan baik pula berarti masyarakat juga mungkin sudah mulai sadar akan hal hal berdampak buruk wilayah sendiri apabila terjadinya kekerasan.

Begitu pula hasil wawancara yang saya lakukan dengan sekretaris partai PNA pendapat beliau mengenai menurunnya jumlah kekerasan pada saat ini

*“Ini kabar yang baik mendengar informasi yang mengatakan bahwa telah terjadinya penurunan kekerasan Dan disini kami juga menyadari akan hal kekerasan yang sering terjadi di Aceh khususnya Pidie dan alhamdulillahnya tapi hari ini kami sudah saling memahami dan fakta hari ini yang terjadi dilapangan kita memang harus bersatu demi kebaikan dan kemajuan Aceh jadi wacana itu kita sudah berpikir kedepan kalau kita saling bergesakan dengan orang lokal apapun sulit orang PA sudah dewasa diluan dalam berpolitik biar pun kami berbeda partai tapi kami sekarang satu tujuan demi kemajuan bersama dan memberikan kelancaran dan kenyamanan dalam pelaksanaan PILKADA*³⁶

Menurut saya juga seperti itu menurunnya kekerasan pada PILKADA 2017 itu akan menjadikan kenyamanan juga bagi kita dalam melaksanakan PILKADA walaupun pada saat itu masih ada juga sedikitnya tindakan kekerasan

³⁵ Hasil wawancara dengan Anggota PA, Kabupaten Pidie Pada Tanggal 31 Oktober 2019

³⁶ Hasil wawancara dengan Seketaris PNA, Pada Tanggal 31 Oktober 2019

tetapi dengan itu kita menjadikan untuk lebih kuat lagi dan percaya diri lagi dalam pelaksanaan selanjutnya

Adapun hasil wawancara dengan pengurus KIP yang mengatakan bahwa

“Dengan terjadinya penurunan kekerasan disini kita juga melihat ada juga peran dari pihak kepolisian dan juga adanya penguatan jajaran komisioner yang bekerja keras dalam menyukseskan pelaksanaan PILKADA tersebut. Ini tentu kabar yang sangat baik bagi kita semua apalagi khususnya wilayah Pidie yang pada dasarnya yang identik dengan konflik di masa lalu.”³⁷

Ini juga perlu kita berikan atusias terhadap kinerja pihak Kepolisian dan jajaran komisioner KIP, Bawaslu dan lain dalam memberikan hasil pilkada yang baik jauh dari kekerasan ini menjadi awal yang baik bagi kita semua dengan terjadinya penurunan kekerasan kita bisa sama sama merasakan betapa indahnya jika pelaksanaan berjalan aman dan semestinya. Ini juga berkat kerja keras kita bersama sama dalam menyukseskan PILKADA yang kita selenggarakan dalam lima tahun sekali

Begitu juga pendapat yang diberikan oleh komisioner Bawaslu mengenai menurunnya tingkat kekerasan

“Dengan hal ini mari sama-sama kita menjaga kesetabilan yang saat ini sudah mulai membaik dengan penurunan kekerasan yang terjadi saat ini saya juga berharap agar kita sama sama mengingatkan untuk tidak melakukan tindakan kekerasan yang saat ini sering terjadi di Aceh ini juga demi kebaikan kita

³⁷ Hasil wawancara dengan KIP, Kabupaten Pidie, Pada tanggal 30 Oktober 2019

bersama agar tidak adanya lagi kekerasan yang terjadi di pilkada untuk seterusnya.kita melihat sudah ada kedewasaan dari beberapa partai pengusung politik yang ada di Pidie ³⁸

Ini memang betul adanya kita harus sama sama memberikan hasil terbaik demi kebaikan Aceh kedepannya maka dari mari sama sama menyuarakan untuk pilkada yang lebih baik demi nyaman dalam melaksanakan proses pemilihan kepala daerah ini juga menjadikan kabar yang begitu dengan adanya kedewasaan dan kesadaran dari beberapa pihak pengusung partai politik yang ada di Pidie.

Hal yang sama juga di sampaikan oleh salah satu masyarakat yang di wawancarai mengenai kekerasan yang menurun

*Kita tahu ada beberapa alasan mengapa menurunnya kekerasan yang telah terjadi di Pidie dan ini membuktikan bahwa aceh terutama sudah lebih baik dari sebelum sebelumnya yang biasanya dikenal dengan pilkada dengan kekerasan yang sudah melekat lantaran adanya sejarah yang menyebutkan aceh yang tidak luput dari kekerasan. Dan hari ini sudah sewajarnya kita membenahdiri agar memberikan dampak positif bagi kita semua untuk kami bisa memliih sesuai hati nurani dan yang sesuai dengan kapsitasi sicalon.*³⁹

Memang betul harus adanya kesadaran dari pihak pengusung partai dan masyarakat juga banyak berharap akan hal itu yang menjadikan masyarakat untuk

³⁸ Hasil wawancara dengan BAWASLU Pidie, Junaidi S.Ag MH, Pada tanggal 30 Oktober 2019

³⁹ Hasil wawancara dengan Masyarakat, Kabupaten Pidie, Pada Tanggal 01 November 2019

nyaman dalam melakukan pemilihan tanpa adanya rasa kekhawatiran yang berlebihan dalam memilih kepada daerah tersebut kepala daerah tersebut



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka penulis telah merangkum beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan dampak kekerasan Pilkada terhadap partisipasi Politik di Pidie.

Berdasarkan penelitian yang saya lakukan bahwa dengan tingginya angka kekerasan yang terjadi di Pidie dan terjadinya penurunan kekerasan ini menjadikan hal bagi Pelaksanaan PILKADA di Pidie khususnya. Dengan terjadinya penurunan dengan hasil penelitian yang saya lakukan yaitu karena kurangnya dana dari Pemda (Pemerintahan Daerah) sehingga jajaran Komisioner KIP tidak dapat melakukan sosialisasi terhadap masyarakat untuk memberikan wawasan terhadap masyarakat tentang penting untuk memilih dan memberikan hak Suara dan juga kurangnya pengamanan dari pihak kepolisian maupun pelaksanaan PILKADA.

Menjadi nilai positif bagi kita ialah telah terjadinya penurunan kekerasan ini menjadi pelajaran buat kita semua agar sama-sama menjaga dan menjadikan PILKADA ini menjadidi lebih baik, nyaman dan sesuai hati nurani Masyarakat dalam memilih, dengan apa yang telah terjadi selama ini membuat masyarakat dan dari pihak partai yang ikut dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan PILKADA

sadar akan hal penting untuk tidak melakukan tindakan yang tidak bermoral atau tindakan kekerasan sekarang tingkat kesadaran sudah mulai membaik dengan seiring berjalannya waktu.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul dampak kekerasan pilkada terhadap partisipasi masyarakat di Pidie memberikan saran sebagai berikut:

1. Penelitian mengharapkan agar pemerintah Daerah untuk memberikan anggaran lebih agar pihak KIP bisa melakukan sosialisasi untuk pemahaman Masyarakat untuk memilih dan Masyarakat dapat melihat dan berkaca pada pengalaman dan histori pilkada Aceh selama ini untuk bisa menjadikan ini sebuah pelajaran untuk kita semua dan menjadikan Aceh ini menjadi lebih baik dari pandangan wilayah lain dengan hal hal kekerasan tentunya maka dari itu kita sama sama memperbaiki untuk kita masyarakat Aceh terkhususnya untuk Pidie.
2. Penelitian mengharapkan masyarakat Kepolisian dan pihak penyelenggara untuk lebih memperkuat sistem keamanan yang ada demi terciptanya PILKADA yang Aman dan damai. Menilai PILKADA yang telah berlangsung terakhir ini bahwa masyarakat juga sudah mulai sadar sudah mulai dewasa dalam menyikapinya dan juga sudah memiliki pendidikan pengetahuan tentang pelaksanaan pilkada dengan bukti bahwa berkurangnya insiden-insiden kekerasan pada saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ari Pradhanawati, *Kekerasan politik Dan Kerusakan Sosial Dalam Pemilukada*. Diakses pada 22 febuari 2019 dari situs : <https://media.neliti.com/media/publications/218244>
- Amalia Salabi, *Menyoal Kekerasan Dalam Pemilu*. Maret 2019. Diakses pada tanggal 12 Oktober dari situs : <http://rumahpemilu.org/menyoal-kekerasan-dalam-pemilu-apa-sebab-dan-bentuknya/>
- Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006)
- Cut Maya Aprita Sari, *Kekerasan Pemilu di Aceh*. September 2018. Diakses pada tanggal 20 febuari 2019 dari situs : <https://www.researchgate.net/publication/327667912>
- Devi Retno, *Sejarah Partai Aceh Sebagai Partai Lokal di Indonesia* , Maret 2019. Diakses pada tanggal 12 november 2019 dari situs : <https://sejarahlengkap.com/organisasi/sejarah-partai-aceh>
- Lexy j. Moleong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdaya, 2002
- Ranty Fatya Utami, *Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik*, 12 September 2017. Diakses pada tanggal 25 Oktber dari situs:<https://gurupkn.com/faktor-yang-mempengaruhi-partisipasi>
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia, 2007,
- Rahmat fadhil. dan T.M. jafar sulaiman. *Dominasi Politik Kekerasan dalam politik aceh*. Aceh 2014,
- Sudijono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*, Semarang: IKIP Semarang Press, 1995, hlm. 56.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008,
- Situs Pemerintahan Kabupaten Pidie , diakses pada 10 November dari situs : <https://pidiekab.go.id/2008/08/geografis-dan-topografis/>

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

NOMOR: 241/Un.08/FISIP/Kp.07.6/02/2019

TENTANG

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka dinilai perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam Surat Keputusan ini dinilai cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah RI Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian wewenang pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama Republik Indonesia;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK05/2011 tentang penetapan Institut Agama Islam Negeri Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 Tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan UIN Ar-raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : Keputusan Sidang/seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Politik pada tanggal 22 Januari 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Saudara
1. Dr. Muhammad, M.Ed sebagai pembimbing pertama
2. Rizkika Lhena Darwin, MA sebagai pembimbing kedua
Untuk membimbing skripsi
Nama : Zulfahmi Al Farozi
NIM : 150801094
Prodi : Ilmu Politik
Judul : Dampak Kekerasan Pemilu Terhadap Partisipasi di Pidie.
- KEDUA : Pembiayaan honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut diatas di bebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya semester ganjil 2019/2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 28 Januari 2019

An. Rektor
Dekan,


Ernita Dewi

Tembusan

1. Rektor UIN Ar-raniry Banda Aceh
2. Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan
4. Yang bersangkutan

Instrumen Penelitian

KEKERASAN PILKADA TERHADAP PARTISIPASI POLITIK

(Studi Kasus di Pidie)

Identitas Peneliti

Nama : Zulfahmi Al farozi
Umur : 22 Tahun
Jenis kelamin : Laki Laki
Pendidikan Akhir : SMA Negeri 1 Simpang Kiri
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
Alamat : Jl.Raja Asal Kec. Simpang Kiri

I. Peserta pilkada

1. Bagaimana tingkat partisipasi di Pidie pada pilkada 2017
2. Mengapa masyarakat ikut berpartisipasi pada pilkada 2017
3. Bagaimana partisipasi masyarakat Pidie ketika berlangsungnya pilkada
4. Apa yang penyebab sehingga kecilnya angka partisipasi masyarakat Pidie pada pilkada 2017 dibandingkan dengan pilkada sebelumnya
5. Apakah pada pilkada sebelumnya anda ikut berpartisipasi? Kalau iya, mengapa? Kalau tidak, mengapa?
6. Bagaimana pendapat anda pelaksanaan pilkada 2017 di Pidie?
7. Apakah penggunaan kekerasan dari peserta pemilu terjadi? seperti tekanan dan intimidasi atau ancaman?
8. Bagaimana pendapat anda jika di bandingkan dengan pilkada sebelumnya?
9. Apa saja bentuk bentuk kekerasan yang terjadi pada pilkada 2017

10. Bagaimana pandangan anda terhadap penggunaan kekerasan dalam pilkada?
11. Siapa saja yang paling dominan mengalami kekerasan dalam pemilu di pidie?
12. Apakah motif kekerasan yang terjadi dalam pemilu di Pidie?

II. Elite Politik

1. Sejauhmana tingkat partisipasi masyarakat pada pilkada 2017 di Pidie
2. Bagaimana partisipasi masyarakat pidie ketika berlangsungnya pilkada
3. Apa yang penyebab sehingga kecilnya angka partisipasi masyarakat Pidie pada pilkada 2017 dibandingkan dengan pilkada sebelumnya
4. Bagaimana pendapat anda pelaksanaan pilkada 2017 di Pidie?
5. Bagaimana pendapat anda jika di bandingkan dengan pilkada sebelumnya?
6. Apa saja bentuk bentuk kekerasan yang terjadi pada pilkada 2017?
7. Bagaimana pandangan anda terhadap kinerja pemerintah dalam menangani kekerasan
8. Adakah keterlibatan dari pihak partai dalam terjadinya kekerasan
9. Bagaimana peran pemerintah sejauh ini menanggapi kekerasan yang terjadi di Pidie?
10. Bagaimana pandangan anda terhadap penggunaan kekerasan dalam pilkada?
11. Apakah motif kekerasan yang terjadi dalam pemilu di Pidie?

DOKUMENTASI

Gambar 1
Wawancara dengan Komisior KIP Pidie



Gambar 2
Wawancara dengan Komisioner BAWASLU Pidie



Gambar 3
Wawancara dengan Anggota PA Pidie



Gambar 4
Wawancara dengan Sketaris PNA Pidie



Gambar 5
Wawancara dengan masyarakat Pidie

